

**KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA : PERSPEKTIF
ANALITIS PENGARUH EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN
DEMOKRASI**

Skripsi

Oleh

**DEVITA SARI
NPM. 2111021024**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA : PERSPEKTIF
ANALITIS PENGARUH EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN
DEMOKRASI**

Oleh

DEVITA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA : PERSPEKTIF ANALITIS PENGARUH EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN DEMOKRASI

OLEH

DEVITA SARI

Ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia selama periode 2018-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan FEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, dan demokrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah. Nilai R-squared (R^2) sebesar 0,989608 menunjukkan bahwa sebesar 98,96 persen variasi ketimpangan ekonomi wilayah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan 1,04 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan upaya strategis berupa pemerataan investasi antarwilayah, penguatan desentralisasi fiskal, percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tertinggal, serta peningkatan tata kelola dan kualitas layanan publik daerah.

**Kata Kunci : Ketimpangan Ekonomi Wilayah, Investasi, Pertumbuhan
Ekonomi, Infrastruktur Jalan, Demokrasi**

ABSTRACT

REGIONAL ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA : AN ANALYTICAL PERSPECTIVE ON THE INFLUENCE OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE AND DEMOCRACY

By

DEVITA SARI

Regional economic inequality in Indonesia is still a major challenge in national development. The purpose of the study is to analyze the effect of investment, economic growth, road infrastructure, and democracy on regional economic inequality in Indonesia during the period 2018-2023. The data used is secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) which is processed using the panel data regression method with the FEM approach. The results showed that the variables of investment, economic growth, road infrastructure, and democracy partially had a significant effect on regional economic inequality. The R-squared (R^2) value of 0.989608 indicates that 98.96 percent of the variation in regional economic inequality can be explained by the independent variables in the model, while 1.04 percent is influenced by other factors. Based on these results, strategic efforts are needed in the form of equitable investment between regions, strengthening fiscal decentralization, accelerating road infrastructure development in underdeveloped regions, and improving the governance and quality of regional public services.

Keywords : Regional Economic Inequality, Investment, Economic Growth, Road Infrastructure, Democracy

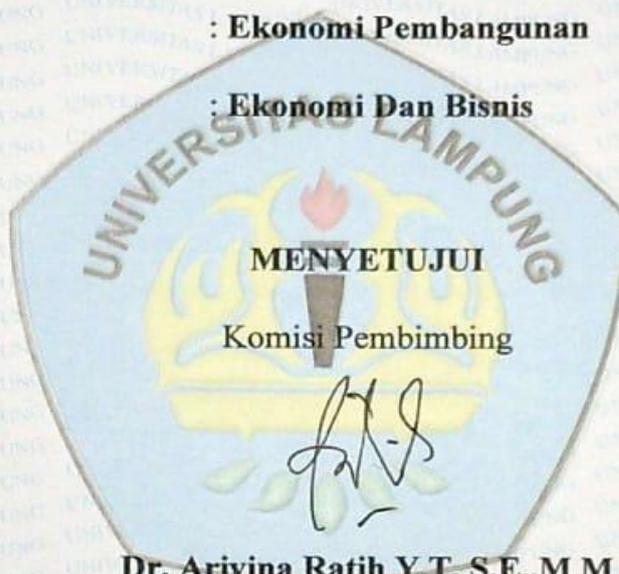
Judul Skripsi : **Ketimpangan Ekonomi Wilayah Di Indonesia :
Perspektif Analitis Pengaruh Ekonomi,
Infrastruktur Dan Demokrasi**

Nama : **Devita Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2111021024**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**



Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E.,M.M

NIP 198007052006042002

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

A handwritten signature in black ink, identical to the one in the logo, is placed over the text of the Dean's signature.

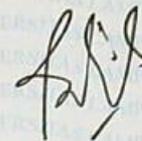
Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E.,M.M

NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

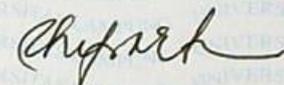
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M



.....

Penguji I : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si



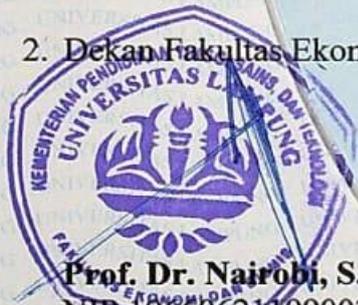
.....

Penguji II : Prayudha Ananta, S.E., M.Si

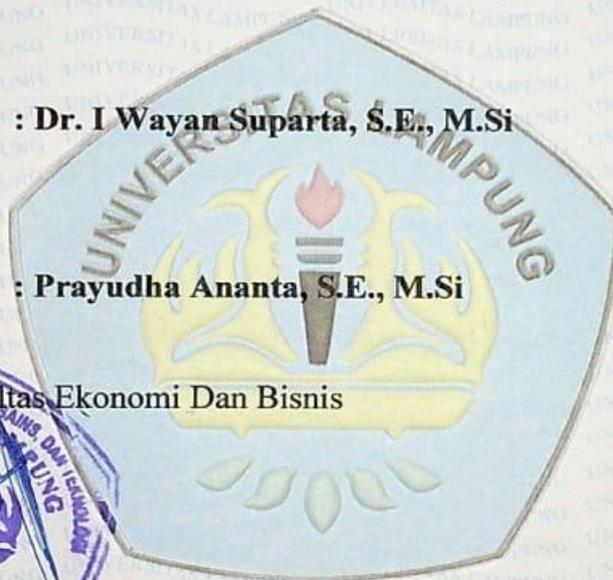


.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Mei 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Devita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2111021024

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Ketimpangan Ekonomi Wilayah Di Indonesia : Perspektif Analitis Pengaruh Ekonomi, Infrastruktur Dan Demokrasi” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Devita Sari

RIWAYAT HIDUP



Devita Sari, lahir pada tanggal 24 Agustus 2003 di Gunung Batin, Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Yusuf dan Ibu Rina Wati.

Penulis memulai pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SDN 4 Margo Dadi pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 3 Tumijajar dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya UKM-F Rois FEB (2022–2024), Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) (2021–2022), dan Forum Komunikasi Bidikmisi Universitas Lampung (2022–2023). Pada Februari 2024 hingga Juni 2024, penulis mengikuti program Kampus Merdeka Studi Independen pada bidang data sains. kemudian pada Juli 2024, penulis melaksanakan magang di PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang di bidang Transaksi Energi Listrik. Kemudian pada September 2024 penulis melaksanakan magang di Bank Indonesia pada bidang Fungsi Data Statistik dan Ekonomi Keuangan (FDSEK). Kemudian pada Januari 2024, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2024 di Menggala Tengah, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Berkerja keras, berdoa, dan percaya bahwa usaha tidak mengkhianati hasil”

(Papah)

“Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kamu raih, tetapi tentang seberapa besar kamu dapat memberi arti untuk orang lain”

(Mamah)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94 : 6)

“Pendidikan adalah jembatan emas menuju masa depan”

(Mohammad Hatta)

“It Always seems impossible until it's done”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan anugerah, rahmat, dan petunjuk-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada :

Orang Tuaku Tersayang

Papah & Mamah,

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya mengucapkan terima kasih kepada papah dan mamah atas segala pengorbanan, kesabaran, perhatian, nasihat, doa dan kasih sayang yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk mamah, serta memberikan tempat terbaik di sisi-Nya untuk almarhum papah tercinta.

Kakak & Adikku

Yang telah memberikan doa, nasehat dan motivasinya

Keluarga Besar,

Yang telah memberikan dukungan, motivasi dan mendoakan penulis

Sahabat- Sahabatku,

Yang telah menemani, mendukungku dan mewarnai masa perkuliahan

Para Dosen dan civitas akademika,

Yang telah memberikan ilmu, bimbingan, inspirasi, bantuan, serta dukungan selama perjalanan akademik penulis.

Almamater Kebanggaan

Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul “ Ketimpangan Ekonomi Wilayah di Indonesia : Perspektif Analitis Pengaruh Ekonomi, Infrastruktur dan Demokrasi”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, serta dukungan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta Dosen Pembimbing yang telah meluangkan pikiran, waktu, tenaga, ilmu dan sarannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E.,M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prayudha Ananta, S.E.,M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan pikiran, waktu, tenaga, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembahas I saat seminar proposal yang telah meluangkan pikiran, waktu, tenaga, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembahas I saat seminar hasil yang telah meluangkan pikiran, waktu, tenaga, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta inspirasi selama masa perkuliahan,serta para staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas segala bantuan dan dukungan yang turut memperlancar penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Papah Yusuf dan Mamah Rina Wati, terimakasih atas segala bentuk dukungan, pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan papah ditempatkan disisi terbaiknya Allah SWT, aamiin.
10. Kakak dan adik-adik ku tersayang, Yulita Sari, Gita Husada, Wahyu Anggara, dan Okta Amelia yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa kepada penulis.
11. Keluarga besar Sahbat dan Amnah serta keluarga besar Alm. Sulaiman dan Alm. Siti Nurjannah, paksu, maksu, ami, umati, umita, om, abi, umi, papi, mami, binda, kiyay, paduka, dan adik-adik sepupu yang tidak dapat disebut satu persatu.
12. Kepada Ade Prasetyo, terimakasih atas dukungan, kesabaran, doa, motivasi, nasihat dan semangat yang selalu diberikan selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
13. Sahabat-sahabatku, Annisa, Filza, Nurfa, Incha, Gita, ayuni Anggraini yang telah memberikan warna-warni kehidupan penulis selama proses perkuliahan.
14. Teman-teman yang juga telah menemani penulis selama penyusunan skripsi, Cholly, Salma, Aqil.

15. Teman-teman satu PA, Gita, Yasidik, Mezha yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan.
16. Teman-teman KKN Menggala Tengah 2024, Aziza, Dinda, Anisa, Tamara, Ilham, Aqil, Fajar.
17. Keluarga besar UKM-F Rois FEB, Putri, Nyimas, Lilla, Lintang, Annisa, Nurfa, Gita, Filza, Kak Latiffa, Kak Henni, dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.
18. Almamater kebanggaan, Universitas Lampung.
19. Secara khusus untuk diri sendiri, terima kasih atas kesabaran, ketekunan, dan semangat yang terus dijaga selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga perjalanan ini menjadi pijakan untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi di masa depan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Semoga segala doa, dukungan, serta bimbingan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Bandar Lampung, 28 April 2025

Devita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2 TINJAUAN TEORI.....	14
2.1 Tinjauan Teoritis.....	14
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	14
2.1.2 Ketimpangan Ekonomi Wilayah.....	15
2.1.3 Investasi	18
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.1.5 Infrastruktur Jalan	25
2.1.6 Demokrasi	27
2.1.7 Hubungan Antar Variabel.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
2.4 Hipotesis	42
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian	44
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.3 Metode Analisis	47

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Hasil	54
4.1.1 Uji Statistik Deskriptif	54
4.1.2 Pemilihan Model Regresi.....	56
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.1.4 Hasil Persamaan Regresi Data Panel Pada Model Terpilih FEM.....	59
4.1.5 Uji Parsial (Uji t).....	61
4.1.6 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	62
4.1.7 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	62
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah	63
4.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah.....	64
4.2.3 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah.....	66
4.2.4 Pengaruh Demokrasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah.....	68
4.2.5 Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Jalan Dan Demokrasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah	70
4.2.6 <i>Individual Effect</i>	71
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Deskripsi Variabel	44
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.2 Uji Chow	56
Tabel 4.3 Uji Hausman	57
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel Pada FEM	60
Tabel 4.7 Uji Hipotesis (Uji t)	61
Tabel 4.8 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	62
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.10 Rata-Rata Investasi di Provinsi Indonesia tahun 2018-2023 ...	65
Tabel 4.11 Indeks Persepsi Korupsi	69
Tabel 4.12 <i>Individual Effect</i>	71

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Indeks Williamson di Indonesia Tahun 2018-2023.....	2
Gambar 1.2	Rata-Rata Indeks Williamson per Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023.....	3
Gambar 1.3	Rata-Rata Investasi (Triliun Rupiah) di Indonesia Tahun 2018-2023	5
Gambar 1.4	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Persen) di Indonesia Tahun 2018-2023.....	7
Gambar 1.5	Rata-Rata Infrastruktur Jalan (Kilometer) di Indonesia Tahun 2018-2023	9
Gambar 1.6	Rata-Rata Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia Tahun 2018-2023	10
Gambar 2.1	Kurva Kuznet	23
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1	Uji Normalitas	58

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar hingga saat ini yang dirasakan di banyak negara dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2024 di 36 negara termasuk Indonesia, lebih dari setengah responden atau 54 % menganggap kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin sebagai masalah yang sangat besar di negaranya dan Sebanyak 30% lainnya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan masalah yang cukup besar (Wike et al., 2025).

Ketimpangan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan wilayah yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan tingkat kemiskinan di berbagai daerah (Hadju et al., 2021). Ketimpangan ekonomi antarwilayah muncul akibat adanya perbedaan besar antara wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Hal ini disebabkan karena wilayah tertinggal belum mampu memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang ada dan masih menghadapi kendala dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi (Lasaiba, 2023). Akibatnya wilayah maju semakin berkembang dengan infrastruktur yang mendukung, sementara wilayah yang tertinggal mengalami stagnasi dalam pembangunan.

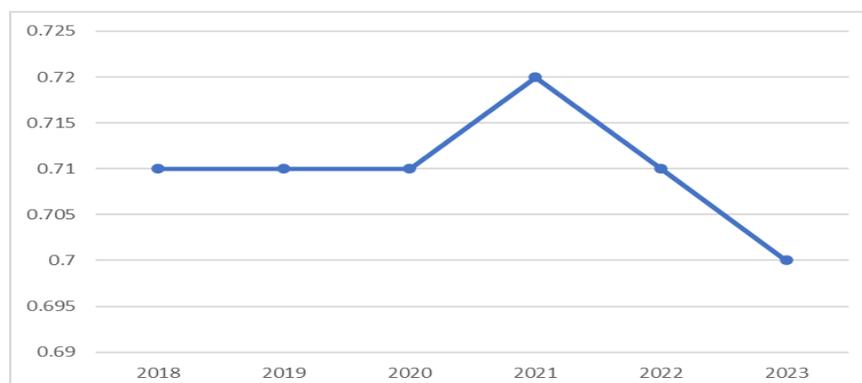
Ketimpangan ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal masih dapat dirasakan hingga saat ini (Marpaung et al., 2024). Misalnya, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan di kota-kota besar jauh lebih memadai dibandingkan di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur yang cenderung terfokus di wilayah perkotaan dengan potensi ekonomi yang lebih tinggi dapat memperlebar kesenjangan dengan wilayah perdesaan yang seringkali tertinggal (Sukwika, 2018a). Ketidakadilan sosial semakin terasa, kemiskinan meningkat, dan sulit bagi masyarakat di wilayah

tertinggal untuk menikmati manfaat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adil dan merata agar setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Indonesia adalah negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang relatif tinggi. Hal ini terlihat dalam RPJM 2015-2019 yang dirancang pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diatasi dalam perencanaan pembangunan dimasa depan. Apabila tidak segera diatasi, ketimpangan ini dapat berdampak pada kehidupan sosialnya masyarakat. Oleh karena itu, usaha pembangunan pro daerah tertinggal menjadi kewajiban (RPJM, 2014).

Selain itu, dapat dilihat juga pada RPJMN 2020-2024 yang dirancang pada tahun 2019 yang diarahkan pada upaya mengatasi isu strategis utama yaitu ketimpangan pembangunan antarwilayah (RPJMN, 2019). Dalam kebijakan pembangunan RPJMN 2020-2024, Indonesia telah memutuskan tujuh wilayah pembangunan untuk : 1). Sumatera, 2). Jawa Bali, 3). Nusa Tenggara, 4). Kalimantan, 5). Sulawesi, 6). Maluku, dan 7). Papua (Fahma & Hendarto, 2022).

Satu indikator pengukuran ketimpangan pembangunan ialah Indeks Williamson yang menunjukkan ketidakmerataan ekonomi wilayah berdasarkan PDRB perkapita dan jumlah penduduk. Rentang Indeks ini yakni 0 hingga 1. Nilai mendekati 0 memperlihatkan ketimpangan pembangunan wilayah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang merata di setiap wilayah. Sebaliknya, nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pembangunannya tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak merata antar wilayah.

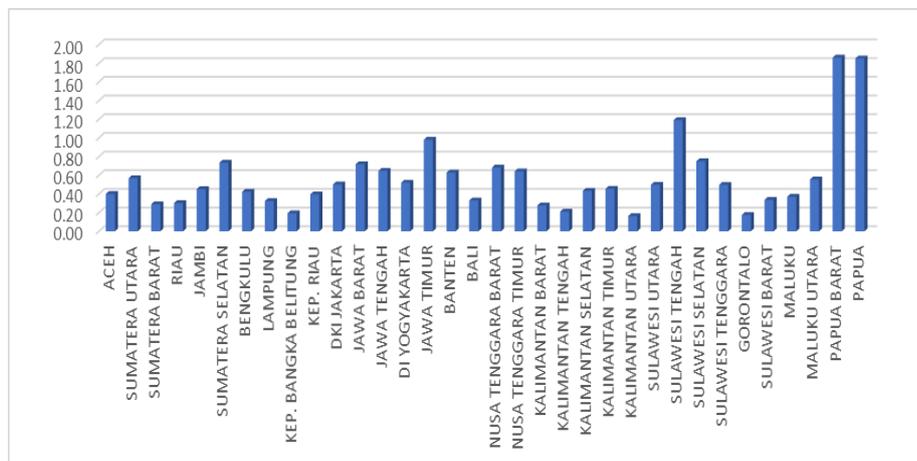


Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2023 (data diolah)

Gambar 1. 1 Indeks Williamson di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.1 tentang Indeks Williamson di Indonesia (2018-2023) menunjukkan di Indonesia, ketimpangan pembangunan antar wilayahnya begitu tinggi selama periode 2018-2023, dengan nilai Indeks Williamson yang konsisten berada pada kisaran 0.70-0.72. menurut kriteria ketimpangan nilai Indeks Williamson antara 0.7-1 menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi (Karim et al., 2023). Ketimpangan pembangunan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0.72 dan terendah pada tahun 2023 sebesar 0.70.

Setiap daerah di Indonesia menghadapi permasalahan ketimpangan pembangunan dan tidak ada satu pun wilayah yang sepenuhnya bebas dari ketimpangan pembangunan. Ini tampak dari perbedaan nilai Indeks Williamson di berbagai wilayah di Indonesia, dimana beberapa wilayah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi, sementara wilayah lainnya relatif lebih merata. Nilai Indeks Williamson yang tinggi berarti ketimpangan antarwilayah kini menjadi masalah serius dimana perlu mendapatkan perhatiannya pemerintah. Ketimpangan di Indonesia masih memerlukan perbaikan kebijakan daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2023 (data diolah)

Gambar 1. 2 Rata-Rata Indeks Williamson Per Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.2 tentang rata-rata Indeks Williamson per provinsi di Indonesia tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas antar provinsi terkait ketimpangan pembangunan. Beberapa provinsi dengan ketimpangan pembangunan yang tertinggi adalah Papua 1.85, Papua Barat sebesar 1.86, di ikuti

oleh Sulawesi Tengah sebesar 1.19 dan Jawa Timur 0.98. Nilai Indeks Williamson yang tinggi ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan seperti memperluas pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebaliknya, provinsi dengan ketimpangan pembangunan yang rendah adalah Kalimantan Utara sebesar 0.16, diikuti provinsi Gorontalo 0.18, dan Kep. Bangka Belitung sebesar 0.19, menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dan potensi pembangunan di wilayah-wilayah tersebut lebih merata. Sementara provinsi yang memiliki ketimpangan cukup tinggi adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa tengah, yang dikarenakan provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi.

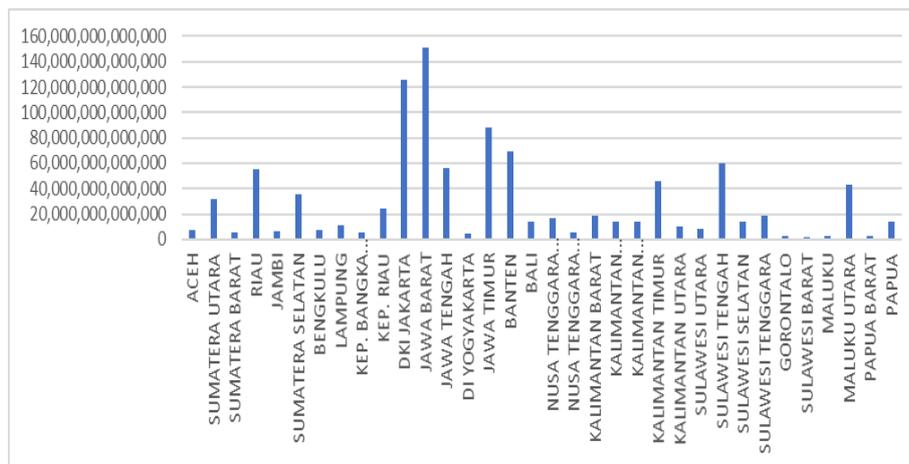
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani (2014) dengan perhitungan Indeks Williamson disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan lebih tinggi di Indonesia bagian Barat dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur. Indonesia bagian Barat dengan nilai Indeks rata-rata sebesar 0,83 dan 0,45 untuk Indonesia bagian Timur. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Dewanto and Rahmawati (2021) menunjukkan ketimpangan pembangunan yang masih cukup tinggi antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian timur yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang masih belum merata dan kurangnya pengelolaan secara efektif.

Investasi merupakan penempatan dana pada satu atau lebih aset dengan jangka waktu panjang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan (Adnyana, 2020). Jika dilakukan secara efektif investasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta seperti PMDN dan PMA yang dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan dengan mendistribusikan sumber daya dan hasil ekonomi secara tidak merata di berbagai wilayah.

Myrdal dalam Jhingan (2016) menyatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia sering disebabkan oleh efek balik atau negatif (*backwash effect*) yang lebih besar dibandingkan dengan efek sebar positif (*spread effect*). Efek balik terjadi ketika adanya pergeseran modal/investasi yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan

pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. ketimpangan diperburuk oleh distribusi investasi yang tidak merata, tidak semua wilayah mendapatkan aliran investasi yang sama. Oleh karena itu, penting bagi upaya peningkatan investasi terutama oleh pemerintah untuk fokus pada pengurangan ketimpangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Penelitian mengenai pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah menunjukkan berbagai hasil yang bervariasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azim et al (2022), investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfurqani et al. (2021) investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, dengan realisasi investasi yang tinggi secara efektif dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi ketimpangan dalam pembangunan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018-2023

Gambar 1. 3 Rata-Rata Investasi (Triliun Rupiah) di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.3 tentang rata-rata investasi di Indonesia tahun 2018-2023, terlihat bahwa ada ketimpangan Investasi. Provinsi di Pulau Jawa mendominasi aliran investasi lebih besar dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa. Provinsi Jawa Barat mencatat investasi tertinggi sebesar Rp. 151.13 triliun, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar Rp. 125.46 triliun, dan Jawa Timur sebesar Rp.88.27 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pusat ekonomi nasional masih berpusat di Pulau Jawa, dimana

infrastruktur lebih maju, aksesibilitas lebih tinggi serta jumlah tenaga kerja yang kompeten sehingga menarik lebih banyak investor.

Sebaliknya, Provinsi dengan investasi terendah yaitu provinsi Sulawesi Barat dengan investasi sebesar Rp.1.63 triliun, diikuti oleh Maluku sebesar Rp.2.21 triliun, dan Papua Barat sebesar Rp.2.23 triliun. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menarik investasi yang dapat disebabkan oleh adanya keterbatasan infrastruktur, geografis yang sulit di jangkau dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut (Azim et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

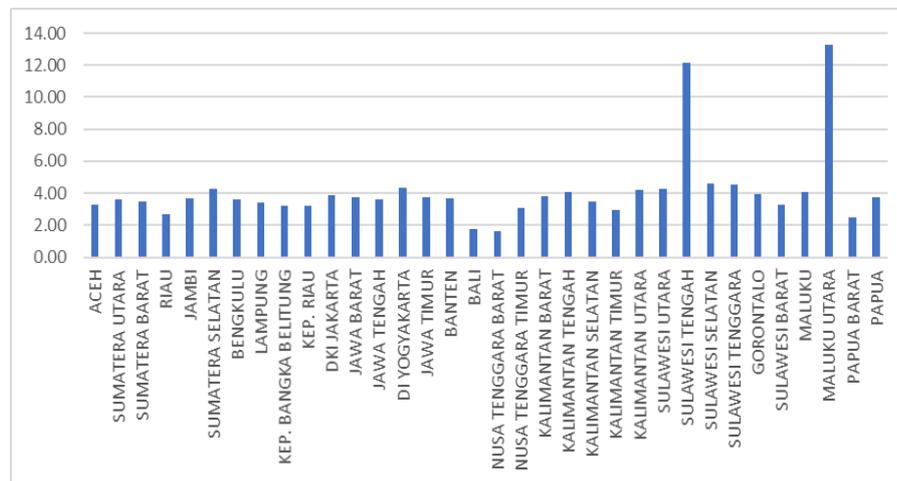
Selain investasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (Agusalim, 2016; Damanik et al., 2018; Istiqamah et al., 2018; Zusanti et al., 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gabriel et al. (2021) variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Bintung, setiap pertumbuhan ekonomi meningkat akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan pembangunan. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Yusica et al. (2018) variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah kini berupaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung tercermin melalui laju pertumbuhan produk domestik regional bruto sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya pembangunan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan pembangunan. Namun realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat malah memperburuk ketimpangan antarwilayah (Hasan et al., 2023). Daerah yang lebih maju terus berkembang, sementara daerah tertinggal semakin terbelakang.

Sasaran pembangunan di negara berkembang adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Peningkatan ini, mengindikasikan bertambahnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu seluruh pembangunan harus diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan signifikan.

Namun, wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan daerah lain akan menghadapi tekanan yang meningkat akibat perpindahan penduduk dari daerah lain (Yesiana et al., 2015) . Perpindahan ini dipicu oleh peluang kerja yang lebih besar di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan terus mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena sumber daya potensial cenderung berpindah ke pusat pertumbuhan yang menyebabkan akumulasi pertumbuhan ekonomi di daerah maju semakin tinggi dengan didukung oleh perpindahan sumber daya tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018-2023

Gambar 1.4 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Persen) di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.4 tentang rata-rata laju pertumbuhan produk domestik regional bruto ADHK di Indonesia tahun 2018-2023, terlihat bahwa provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah provinsi Maluku utara sebesar 13,29 %, diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 12,18 %. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang pesat di wilayah tersebut, yang dapat mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih optimal. Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,64 %. Pertumbuhan ekonomi yang relatif

rendah mengindikasinya perlunya strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong perkembangan ekonomi di wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

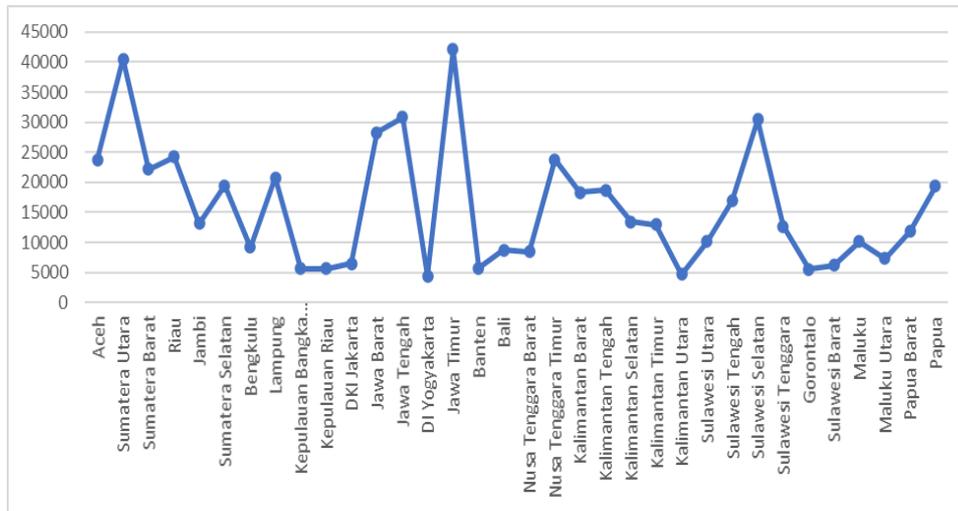
Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mempercepat kemajuan pembangunan baik tingkat nasional maupun regional. Infrastruktur berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan infrastruktur jalan ini menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimasa depan (Sukwika 2018).

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas di suatu wilayah berimplikasi pada peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas regional. Infrastruktur yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi, penciptaan kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat (Andrianus & Alfatih, 2023). Salah satunya infrastruktur jalan yang menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 jalan berperan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi sebagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya untuk lalu lintas.

ketersediaan infrastruktur yang memadai berperan sebagai fasilitas yang mempermudah distribusi barang dan mobilitas individu antar wilayah yang dapat menurunkan biaya transportasi dan logistik sehingga memungkinkan produsen di daerah tertinggal untuk mengakses pasar yang lebih luas. Selain itu, infrastruktur jalan dapat menarik investasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2019) menunjukkan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar daerah di Indonesia. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal

et al. (2019) ditemukan infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2023

Gambar 1. 5 Rata-Rata Infrastruktur Jalan (Kilometer) di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.5 tentang rata-rata infrastruktur jalan di Indonesia tahun 2018-2023 menunjukkan terdapat variasi dalam infrastruktur jalan antar provinsi. Provinsi dengan Panjang jalan terpanjang adalah Jawa Timur sepanjang 42.068 km, diikuti oleh Sumatera Utara sepanjang 40.490 km dan Jawa Tengah sepanjang 30.840 km. Sementara, provinsi dengan Panjang jalan terpendek adalah DI Yogyakarta sepanjang 4.384 km, Kalimantan Utara sepanjang 4.729 km dan Gorontalo sepanjang 5.517 km.

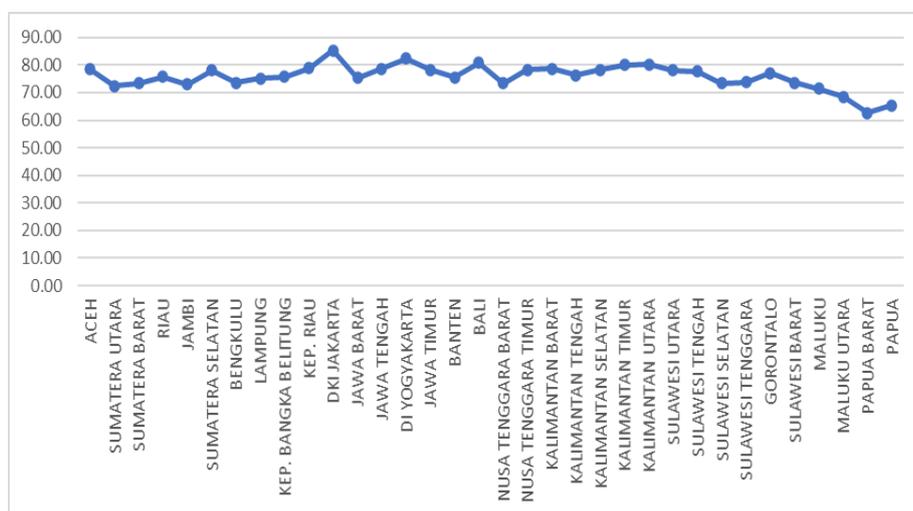
Variasi Panjang jalan ini mencerminkan perbedaan dalam ukuran wilayah dan tingkat pembangunan ekonomi antar provinsi. Provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki infrastruktur jalan lebih baik dibandingkan provinsi yang berada di luar Jawa terutama di Indonesia bagian timur.

Penyebab lain dari ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia adalah Demokrasi (Mustika et al., 2023; Zulkarnaen, 2017). Di Indonesia, penelitian yang mengkaji pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan pembangunan masih sangat terbatas, meskipun topik ini telah banyak diteliti pada ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Ratio Gini*. Sedangkan pemahaman tentang bagaimana demokrasi

mempengaruhi ketimpangan pembangunan sangat penting untuk menganalisis hubungan antara sistem politik dan pembangunan ekonomi.

Demokrasi dapat diukur dengan Indeks Demokrasi yang mencerminkan kualitas tata kelola politik suatu wilayah. Kurangnya kemajuan dalam meningkatkan Indeks Demokrasi yang dapat memperlambat pencapaian tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu misi dari SDGs adalah mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara yang tercermin dalam tujuan ke-10 BPS (2015). Indeks Demokrasi yang rendah menunjukkan lemahnya partisipasi politik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga menghambat kebijakan untuk menekan ketimpangan pembangunan. Kelemahan dalam aspek demokrasi akan memperburuk kondisi bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi yang inklusif memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mendukung kebijakan ekonomi dan sosial yang adil, sehingga dapat memastikan bahwa sumber daya dan pembangunan diterapkan secara lebih merata dan adil di berbagai wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018-2023

Gambar 1. 6 Rata-Rata Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.6 tentang rata-rata Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia tahun 2018-2023, terlihat bahwa provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai rata-rata sebesar 85.23. Hal ini menunjukkan bahwa DKI

Jakarta memiliki tata kelola pemerintah yang baik, kuatnya kebebasan sipil, kesetaraan, dan partisipasi politik yang tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan Indeks Demokrasi terendah adalah Papua Barat dengan nilai rata-rata sebesar 62.65 yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam penguatan demokrasi di wilayah tersebut.

Perbedaan antara provinsi dengan Indeks Demokrasi tertinggi dan Indeks Demokrasi terendah mencerminkan adanya perbedaan dalam penerapan serta kualitas demokrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi tertinggi dapat dijadikan acuan bagi daerah lain dalam penerapan sistem demokrasi yang lebih efektif. Sedangkan, provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi terendah memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, reformasi kebijakan, dan penguatan lembaga demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan inklusif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Ketimpangan Ekonomi Wilayah di Indonesia : Perspektif Analitis Pengaruh Ekonomi, Infrastruktur dan Demokrasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia ?
5. Bagaimana investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam memahami hubungan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, demokrasi serta dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi. Selain itu, dapat juga menjadi bahan diskusi lebih lanjut mengenai isu-isu ekonomi dan sosial di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang mendukung atau menolak teori-teori yang ada tentang pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori politik dan ekonomi.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan perekonomian wilayah dengan

mempertimbangkan faktor investasi dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi. Selain itu, peneliti dapat membantu dalam merancang program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2 TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk disertai perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, pemerataan pendapatan disuatu negara serta peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh (Bapedda, 2017). Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan output produksi atau Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga perubahan dalam struktur sosial, kelembagaan, teknologi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui transformasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Todaro and Smith (2012) menjelaskan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar peningkatan ekonomi tetapi juga mencakup kondisi nyata dan pola pikir kolektif masyarakat. Pembangunan yang efektif melibatkan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik melalui perpaduan berbagai proses sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses komprehensif yang mencakup transformasi dalam struktur ekonomi dan sosial yang difasilitasi oleh peningkatan keterampilan dan kemampuan. Peningkatan keterampilan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkontribusi pada pengetasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Meningkatnya pendapatan per kapita yang stabil juga mendorong akan kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkelanjutan.

Terdapat tiga tujuan pembangunan antara lain (Todaro & Smith, 2012).

1. Meningkatkan aksesibilitas dan memperluas jaringan distribusi untuk barang-barang kebutuhan termasuk makanan, perumahan, perawatan Kesehatan, dan keamanan unntuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Meningkatkan standr hidup yang tidaak hanya melalui pertumbuhan pendapatan tetapi juga dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kualitas Pendidikan dan memprioritaskan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Upaya-upaya ini berkontribusi pada kesejahteraan material dan menumbuhkan rasa harga diri individu dan nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan masyarakat, secara tidak langsung membuat mereka mandiri dan terbebas dari rasa ketergantungan kepada individu dan negara-bangsa serta mengatasi hambatan yang menyebabkan ketidaktahuan dan kesulitan.

2.1.2 Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan ekonomi wilayah di definisikan sebagai perbedaan atau ketidakmerataan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau daerah. Perbedaan ini memengaruhi kapasitas masing-masing daerah dalam mendorong proses pembangunan yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan. Akibatnya, memunculkan klasifikasi wilayah menjadi daerah berkembang dan daerah tertinggal (Suroso, 2023).

Kesenjangan ekonomi antarwilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah pemusatan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, ketimpangan distribusi sumber daya alam, perbedaan karakteristik demografi, serta terbatasnya kelancaran arus barang dan jasa, kurangnya akses terhadap infrastruktur dan alokasi investasi yang tidak merata (Dewi et al., 2021). Tingginya pemusatan aktivitas ekonomi pada daerah tertentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut, tetapi disisi lain memperbesar kesenjangan dengan wilayah lain yang memiliki aktivitas ekonomi lebih rendah. Selain itu, kurangnya mobilitas barang dan jasa antarwilayah juga menjadi penghambat bagi daerah-daerah tertinggal untuk berkembang secara optimal.

Dampak dari ketimpangan ekonomi wilayah meliputi kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, keterbatasan akses terhadap layanan dasar

seperti pendidikan, kesehatan serta potensi ketidakstabilan sosial dan politik (Widyandini, 2023). Ketimpangan ekonomi wilayah dapat menghambat pembangunan secara keseluruhan karena daerah-daerah tertinggal tidak memiliki kapasitas yang cukup seperti sumber daya, infrastruktur, teknologi, investasi. Keterbatasan tersebut menyebabkan daerah-daerah ini mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya sehingga memperburuk ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerataan pembangunan dengan langkah-langkah strategis seperti pengembangan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan akses layanan publik serta pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi diseluruh wilayah di suatu negara. Indeks ini mengidentifikasi sejauh mana distribusi pendapatan atau produktivitas regional menyimpang dari rata-rata nasional, dengan mempertimbangkan jumlah populasi di setiap wilayah. Indeks Williamson membantu untuk memahami kesenjangan ekonomi regional yang sering muncul selama proses pembangunan nasional yang biasanya meningkat pada tahap awal pembangunan dan kemudian menurun ketika pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata. Berikut rumus Indeks Williamson antara lain

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}}{\bar{Y}}$$

Keterangan :

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB per kapita daerah kab / kota di tiap provinsi di Indonesia

\bar{Y} : PDRB per kapita rata-rata daerah kab / kota di tiap wilayah di Indonesia

f_i : Jumlah penduduk daerah kab / kotaa di tiap provinsi di Indonesia

n : Jumlah penduduk di tiap provinsi di Indonesia

Kreteria hasil yang digunakan antara lain Syafrizal (1997) dalam (Waluyaningsih & Setiawan, 2020)

Indeks 0.7-1 : Tinggi

Indeks 0.4-0.69 : Sedang

Indeks < 0.39 : Rendah

Menurut Sjafrizal (2014) terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah, antara lain :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam di setiap wilayah dapat memengaruhi aktivitas produksi lokal. Daerah yang kaya akan sumber daya alam umumnya mampu menghasilkan barang-barang tertentu dengan efisiensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang kekayaannya terbatas. Keunggulan ini mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, sementara daerah dengan sumber daya alam yang minim berpotensi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis mencakup perbedaan laju pertumbuhan penduduk, struktu penduduk, kondisi ketenagakerjaan, hingga pola perilaku serta etos kerja masyarakat di masing-masing wilayah. Wilayah dengan karakteristik demografis yang lebih menguntungkan cenderung menunjukkan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga mampu menarik minat investor. Dampaknya, investasi tersebut membuka lebih banyak peluang kerja dan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi aktivitas perdagangan antarwilayah serta perpindahan penduduk, baik yang terjadi secara spontan maupun melalui regulasi pemerintah. Ketika mobilitas ini terhambat, hasil produksi berlebih di suatu daerah tidak dapat tersalurkan ke wilayah lain yang membutuhkannya. Situasi tersebut dapat memperburuk ketimpangan pembangunan antarwilayah dan menghambat kemajuan daerah-daerah yang masih tertinggal.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Wilayah dengan tingkat konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Keadaan ini turut mendorong percepatan pembangunan daerah melalui terciptanya lebih banyak

peluang kerja serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi yang memungkinkan terjadinya aglomerasi industri yang memberikan keuntungan ekonomi tambahan seperti efisiensi produksi, peningkatan inovasi, dan penurunan biaya operasional. Oleh karena itu, daerah dengan konsentrasi industri yang tinggi biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki konsentrasi industri.

5. Alokasi dana pembangunan daerah

Investasi adalah faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Daerah yang menerima banyak investasi baik dari pemerintah maupun swasta, biasanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Hal ini karena investasi dapat mendorong kegiatan ekonomi, seperti meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, investasi juga berkontribusi pada peningkatan infrastruktur, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

2.1.3 Investasi

Investasi adalah proses menempatkan dana untuk mendapat keuntungan di kemudian hari (Sudarmadji, 2022). Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha atau investor untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam memproduksi berbagai barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Sadono, 2004). Investasi dapat dipandang sebagai komponen integral dari Produk Domestik Bruto (GDP) yang mengaitkan kondisi ekonomi saat ini dengan potensi pertumbuhan di masa depan. Secara substansial, investasi merupakan langkah awal dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai alat strategis bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas. pada akhirnya, untuk menaikkan standar hidup masyarakat dalam jangka Panjang (Mankiw, 2016).

Menurut teori Harrod-Domar, investasi berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya meningkatkan kemampuan produksi tetapi juga menciptakan permintaan baru yang mendorong aktivitas ekonomi (Hanim et al., 2022).

Menurut undang-undang nomor 25 pasal 3 ayat 2 tahun 2007, menyebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain.

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan kesempatan kerja
3. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
4. Memperkuat daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi negara
6. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada kebutuhan masyarakat
7. Mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dengan memanfaatkan pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan asal modal dan investornya, investasi langsung dibagi dua jenis antara lain (M. Rahman, 2020).

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merujuk pada aktivitas investasi yang dilakukan oleh pihak domestik untuk menjalankan usaha di dalam wilayah Republik Indonesia, dengan pembiayaan yang bersumber dari modal dalam negeri. PMDN dipandang sebagai bagian dari kekayaan nasional, mencakup hak kepemilikan dan aset yang dimiliki negara dan swasta (Tamba et al., 2023).

Penanaman modal dalam negeri bertindak sebagai sumber daya keuangan untuk daerah berkembang dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Kenaikan tingkat penanaman modal dalam negeri secara tidak langsung dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Menurut undang-undang nomor 25 pasal 3 ayat 2 tahun 2007, salah satu tujuan utama mendorong penanaman modal dalam negeri tidak hanya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat secara merata yang dianggap

sebagai bagian dari inisiatif pembangunan ekonomi (Kambono & Marpaung, 2020).

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh pihak luar negeri untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Investasi ini dapat dilakukan sepenuhnya dengan modal asing atau melalui kemitraan dengan investor domestik. Pihak yang termasuk dalam kategori penanam modal asing mencakup individu berkewarganegaraan asing, badan usaha asing maupun pemerintah dari negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Tujuan utama penanaman modal asing adalah untuk memperoleh keuntungan, memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Penanaman modal asing memberikan berbagai manfaat seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Penanaman modal asing memiliki peran yang signifikan dalam dinamika ekonomi global, investasi asing dapat membantu negara berkembang dalam memperkuat perekonomian, menciptakan peluang kerja serta meningkatkan daya saing di pasar internasional (Silaban et al., 2024).

2.1.3.1 Teori Karl Gunnar Myrdal

Menurut teori Gunnar Myrdal dalam Jhingan (2016), pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah atau negara dapat menimbulkan dua dampak utama yaitu *Backwash Effect* dan *Spread Effect*. *Backwash Effect* adalah dampak balik yang terjadi ketika daerah yang lebih maju menarik sumberdaya dari daerah lain seperti tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur. Akibatnya, daerah tertinggal semakin sulit berkembang karena kehilangan potensi yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan ekonominya, sehingga ketimpangan ekonomi semakin melebar. Sementara itu, *Spread Effect* merupakan dampak sebar yang terjadi ketika pembangunan di suatu daerah yang sudah maju menyebar ke daerah lain atau sekitarnya melalui perpindahan penduduk, investasi, serta distribusi barang dan jasa. Akibatnya, daerah tertinggal dapat berkembang dan mengejar ketertinggalannya sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.

2.1.3.2 Teori Harrod – Dommar

Menurut Jhingan (2016), Harrod dan Domar menempatkan investasi sebagai faktor utama dalam proses pertumbuhan ekonomi. Investasi berperan dalam menciptakan pendapatan melalui sisi permintaan dan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dengan menambah stok modal dari sisi penawaran. Selama investasi terus berlangsung, pendapatan riil dan output ekonomi akan terus bertambah. Namun, untuk menjaga keseimbangan pendapatan pada tingkat kesempatan kerja penuh setiap tahunnya, baik pendapatan riil maupun output harus tumbuh seiring dengan peningkatan kapasitas produktif modal.

Teori investasi Harrod-Dommar menekankan bahwa investasi atau pembentukan modal merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, modal terbentuk melalui proses akumulasi tabungan yang kemudian dialokasikan untuk investasi. Harrod- Domar berpendapat bahwa pembentukan modal tidak hanya berfungsi sebagai pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan permintaan efektif masyarakat yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Menurut Harrod-Dommar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi maka diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal yang akan mendukung ekspansi kapasitas produksi, serta menekankan pentingnya keseimbangan antara tingkat tabungan dan investasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori ini menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam penggunaan modal agar setiap investasi memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan output.

Teori Harrod-Dommar dalam Nurfifah et al. (2022) Menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah. ketika investasi tidak merata atau hanya terkonsentrasi di satu wilayah maka dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Kurangnya investasi di wilayah berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini, disebabkan oleh kurangnya aktivitas ekonomi yang produktif di daerah yang kekurangan investasi.

Oleh karena itu, distribusi investasi yang tidak seimbang menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan ekonomi wilayah.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

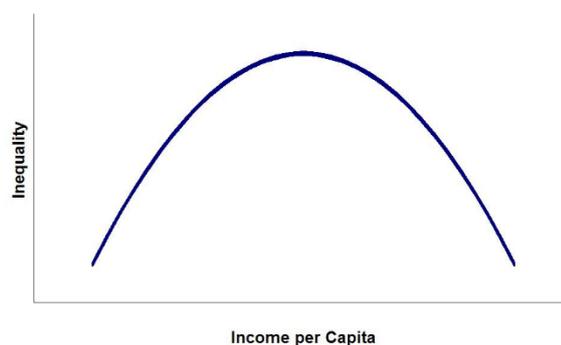
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin melalui kenaikan pendapatan nasional (Todaro & Smith, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas perekonomian, yang dapat diukur dengan pertumbuhan output per kapita (Koyongian et al., 2019).

Paul Samuelson pada tahun 1969 dalam (Boianovsky, 2019) mengembangkan teorema Faktor Harga Penyamaan (FPE) yang menghubungkan dua konsep utama dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi, yaitu konvergensi dan divergensi. Konsep konvergensi yaitu negara maju mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sementara negara berkembang cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat atau tinggi untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Negara-negara berkembang dapat memperoleh keuntungan dengan meniru atau mengadopsi inovasi-inovasi yang telah berhasil diterapkan di negara maju yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, konvergensi menggambarkan kemampuan negara-negara berkembang untuk menutup kesenjangan ekonomi dengan negara-negara maju seiring berjalannya waktu. Sedangkan, konsep divergensi yaitu negara maju terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara negara berkembang justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Konsep divergensi menggambarkan di mana meskipun perdagangan internasional seharusnya membawa manfaat penyamaan tingkat harga faktor produksi, kenyataannya negara-negara berkembang sering kali mengalami kesenjangan yang semakin besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Divergensi ini terjadi karena adanya berbagai hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Hambatan tersebut antara lain meliputi perbedaan dalam tingkat produktivitas, rendahnya tingkat akumulasi modal, dan kebijakan ekonomi

yang tidak efektif. Sebagai akibatnya, meskipun ada potensi untuk penyamaan tingkat harga faktor produksi melalui perdagangan internasional negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam siklus ketertinggalan yang semakin besar dibandingkan negara-negara maju sehingga ketimpangan ekonomi semakin meningkat.

Simon Kuznets mengembangkan hipotesis “U terbalik” untuk menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi.



Gambar 2. 1 Kurva Kuznet

Hipotesis Kuznets pada “U terbalik” menggambarkan hubungan antara ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut hipotesis ini, pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan ekonomi cenderung meningkat seiring dengan transformasi struktural dari sektor tradisional (seperti pertanian subsisten) menuju sektor modern (seperti industri dan jasa). Hal ini terjadi karena pada tahap awal pembangunan, kelompok masyarakat yang telah memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi cenderung lebih mampu merespons perubahan ekonomi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin matangnya proses pembangunan, distribusi pendapatan akan mulai membaik. Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, serta kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif akan menyebabkan ketimpangan menurun (A. N. Rahman & Imansyah, 2021)

2.1.4.1 Teori Ekonomi Neo Klasik (Robert Solow)

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang dikembangkan oleh Robert M. Solow pada tahun 1970 menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi bersumber dari tiga faktor utama: akumulasi modal, tingkat penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Mankiw, 2016). Kemajuan teknologi ini dapat terlihat melalui peningkatan keterampilan atau perkembangan dalam teknologi, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita. Solow menegaskan bahwa dalam model ini, faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan peningkatan keterampilan kerja. Untuk mencapainya, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam model Solow, rumus fungsi produksi sebagai berikut (Sinaga et al., 2024)

$$Y = F(K, L, A)$$

Dimana, Y adalah output total, K adalah modal, L adalah tenaga kerja dan A adalah tingkat teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa produksi memiliki *constant returns to scale* yang berarti jika semua input meningkat pada proporsi yang sama, maka output akan meningkat pada proporsi yang sama pula. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi regional, memungkinkan lebih banyak output yang dihasilkan dengan jumlah input yang sama atau tetap. Output yang dihasilkan dari akumulasi modal dan tenaga kerja akan meningkat seiring waktu (kemajuan teknologi) yang disertai dengan meningkatnya jumlah pengetahuan.

Teori pertumbuhan neoklasik Solow pada dasarnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang menekankan peran akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara berkelanjutan ketika ada kemajuan teknologi karena jika hanya akumulasi modal dan tenaga kerja akan cenderung menghadapi penurunan imbal hasil marginal. Artinya, tanpa adanya inovasi atau peningkatan teknologi, perekonomian akan mencapai kondisi *steady-state*. Dengan itu, cara agar output perkapita tetap terus tumbuh yaitu melalui peningkatan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal (Romer, 1986).

2.1.5 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memfasilitasi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan diartikan sebagai sarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian dari jalan termasuk struktur pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas umum, baik jalan yang berada pada permukaan tanah diatas atau dibawah permukaan tanah atau air kecuali jalur kereta api, lori, dan kabel.

Jalan terbagi menjadi beberapa klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan yaitu Bina Marga 1997 dalam (Rahmanto, 2016) :

1. Klasifikasi menurut fungsi jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga jenis utama antara lain

- a. Jalan arteri berfungsi sebagai jalan utama yang digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah kendaraan yang masuk ke jalan ini dibatasi secara efisien untuk memastikan lalu lintas tetap lancar.
- b. Jalan kolektor berfungsi sebagai penghubung antara jalan arteri dan jalan lokal dengan perjalanan berjarak sedang dan kecepatan rata-rata sedang. Akses masuk ke jalan kolektor juga di batasi untuk menjaga kelancara lalu lintas.
- c. Jalan lokal digunakan untuk perjalanan jarak dekat disekitar daerah tertentu dengan kecepatan rata-rata rendah.

2. Klasifikasi jalan menurut kelas jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan terdiri dari, antara lain

- a. Jalan kelas I adalah jalan yang dirancang untuk dilalui oleh kendaraan dengan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.
- b. Jalan kelas II merupakan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan muatan sumbu terberat mencapai 10 ton.
- c. Jalan kelas III adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan muatan sumbu terberat hingga 8 ton.

3. Klasifikasi menurut tingkat pelayanan

Klasifikasi jalan berdasarkan tingkat pelayanan terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, jalan dengan tingkat pelayanan mantap yaitu jalan yang kondisinya baik dan dapat digunakan secara stabil sepanjang tahun. Kedua, jalan tidak mantap yaitu jalan memiliki kondisi yang kurang baik. Ketiga, jalan kritis yaitu jalan yang kondisinya sangat buruk dan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keselamatan dan kelancaraan lalu lintas.

4. Klasifikasi jalan menurut tingkat kondisi jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan tingkat kondisi jalan terbagi menjadi 4 tingkat antara lain

- a. Jalan dalam kondisi baik adalah jalan yang terawat dengan baik dan tidak memiliki kerusakan yang parah.
- b. Jalan dalam kondisi sedang adalah jalan yang memiliki beberapa kerusakan tetapi masih dapat digunakan dengan aman.
- c. Jalan dalam kondisi rusak ringan adalah jalan yang memerlukan perawatan karena adanya kerusakan kecil yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
- d. Jalan dalam kondisi rusak berat adalah jalan yang memerlukan perbaikan total karena kerusakannya sangat parah dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

5. Klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan wewenang pembinaan jalan terdiri dari beberapa jenis yaitu

- a. Jalan nasional merujuk pada jalan utama yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan jaringan jalan strategis nasional termasuk jalan tol. Jalan nasional berfungsi sebagai penghubung antar provinsi dan bagian dari sistem jaringan primer.
- b. Jalan provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota serta jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten adalah jalan lokal yang berada dalam sistem jaringan primer tetapi tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan. Jalan ini mencakup jalan umum dalam sistem jaringan sekunder di wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan pusat pelayanan di dalam kota. Jalan ini dikelola oleh pemerintah kota dan berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan sehari-hari di dalam kota.
- e. Jalan desa adalah jalan yang menghubungkan permukiman di dalam desa. Jalan desa berfungsi untuk memudahkan akses di tingkat desa dan dikelola oleh aparat desa.

2.1.6 Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah sistem dimana kekuasaan dipegang oleh rakyat, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* artinya rakyat sedangkan *cratos* artinya pemerintahan/kekuasaan (Al-Khansa & Dewi, 2021). Menurut beberapa ahli, demokrasi memiliki definisi yang beragam yaitu menurut Abraham Lincol (1863) demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri (Prayitno & Prayugo, 2023). Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pelaksanaan kekuasaan negara dijalankan oleh para wakil yang dipilih langsung oleh rakyat, berdasarkan kepercayaan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaksanaan kekuasaan tersebut (Malik et al., 2021).

Demokrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akuntabilitas pemerintah yang baik, peningkatan transparansi dan penegakan hukum yang kuat. Akuntabilitas menciptakan stabilitas yang dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Demokrasi juga memungkinkan lebih banyak partisipasi public yang menghasilkan kebijakan redistribusi yang dapat meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, demokrasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jika menghasilkan kebijakan populis yang tidak efisien atau menimbulkan ketidakstabilan politik yang menghalangi investasi (Sabardin & Wibowo, 2023).

Demokrasi juga dapat membantu mengurangi ketimpangan wilayah melalui kebijakan redistribusi yang lebih merata seperti desentralisasi kekuasaan yang memungkinkan daerah tertinggal mendapatkan perhatian lebih. Namun, jika

kekuasaan politik di dominasi oleh wilayah maju maka demokrasi justru dapat memperparah ketimpangan wilayah karena kebijakan cenderung menguntungkan wilayah perkotaan. Kapasitas administrasi yang rendah di wilayah berkembang juga dapat menghambat implementasi kebijakan redistribusi yang efektif karena keterbatasan dalam hal sumber daya yang terampil, infrastruktur serta mekanisme pengawasan dan evaluasi (Ramadhan, 2023). Kondisi ini sering kali memperburuk ketimpangan distribusi bantuan, meningkatkan resiko korupsi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

2.1.6.1 Teori Acemoglu dan Robinson

Teori yang dikembangkan oleh Acemoglu dan Robinson menekankan bahwa pembangunan suatu negara bergantung pada jenis institusi yang diterapkan. Institusi dibedakan menjadi dua yaitu institusi ekonomi inklusif dan institusi ekonomi ekstraktif yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan suatu negara (Muttaqin, 2017).

Institusi ekonomi inklusif mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan hak kepemilikan individu, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, investasi dalam teknologi serta meningkatkan keterampilan. Negara dengan institusi inklusif akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan karena masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja serta pengembangan sektor-sektor baru yang mendorong inovasi dan kemajuan jangka panjang.

Sebaliknya, institusi ekonomi ekstraktif cenderung menguntungkan segelintir elit dan mempertahankan kekuasaan, meskipun dengan mengorbankan mayoritas rakyat. Kebijakan ekonomi dalam sistem ini dirancang untuk memperkaya kelompok elit dan membatasi akses masyarakat luas terhadap peluang ekonomi sehingga menghambat inovasi, kreativitas, dan membatasi akses terhadap Pendidikan serta teknologi. Negara dengan institusi ekstraktif mengalami ketimpangan ekonomi yang semakin besar karena hanya segelintir kelompok yang

menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi sementara mayoritas rakyat semakin tertinggal, ketimpangan sosial dan ketidakstabilan politik yang ditimbulkan pada akhirnya akan menghambat kemajuan negara.

2.1.6.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merujuk pada pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau sistem politik menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam struktur kelembagaannya. Semakin tinggi tingkat demokrasi, semakin besar kemungkinan adanya mekanisme kontrol yang efektif terhadap kekuasaan pemerintah, penegakan hukum yang adil, dan pelayanan publik yang responsif (Anti & Anis, 2024).

Indeks Demokrasi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sistem politik dengan kinerja ekonomi suatu negara. Negara dengan tingkat demokrasi yang lebih tinggi memiliki institusi inklusif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memfasilitasi distribusi sumber daya yang lebih adil. Sebaliknya, negara dengan tingkat demokrasi yang rendah atau memiliki institusi ekstraktif yang menguntungkan segelintir elit dan membatasi peluang ekonomi mayoritas rakyat. Dalam hal ini, Indeks Demokrasi membantu dalam memahami bagaimana kualitas institusi politik dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu negara.

Selain itu, Indeks Demokrasi Indonesia juga berperan penting dalam memetakan lanskap demokrasi Indonesia dengan data yang akurat dan komprehensif. Informasi ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi yang mendalami dinamika demokrasi tetapi juga bagi pembuat kebijakan daerah dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih demokratis. Daerah dengan Indeks Demokrasi rendah juga dapat menggunakan data IDI sebagai acuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Hidayatul et al., 2021).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi (Manshur & Damayanti, 2023).

1. Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan diartikan sebagai kemampuan sektor-sektor atau kelompok-kelompok yang beragam untuk memperoleh otonomi dan kemandirian dari dominasi kekuatan politik otoriter yang ada sebelumnya. Dalam hal ini, kebebasan berarti kemamouan kelompok-kelompok tersebut untuk menentukan dan memperjuangkan kepentingan tanpa adanya intervensi atau pembatasan yang datang dari kekuatan politik otoriter. Warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta melindungi diri dari diskriminasi atau pengekangan yang berasal dari kelompok maupun kekuasaan negara. Kemandirian ini menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat demokrasi karena semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut semakin tinggi pula kualitas demokrasi di negara tersebut. Aspek kebebasan yang berkembang juga berkontribusi pada penguatan partisipasi politik dan sosial yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas demokrasi dan mendorong pemerintah yang lebih responsif dan inklusif. Terdapat beberapa indikator dalam aspek kebebasan antara lain :

- a. Terjaminnya kebebasan untuk berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat tanpa campur tangan dari aparat negara.
- b. Terjaminnya kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan menyuarakan pendapat antar individu dalam masyarakat.
- c. Terjaminnya kebebasan untuk memeluk keyakinan sesuai dengan pilihan pribadi masing-masing.
- d. Terjaminnya kebebasan untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, menyampaikan pendapat dan memeluk keyakinan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
- e. Terjaminnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu bagi semua kelompok dalam masyarakat.
- f. Pemenuhan hak-hak pekerja dalam segala aspek terkait pekerjaan dan kondisi kerja.
- g. Kebebasan pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa kendala dari pihak luar.

2. Aspek kesetaraan

Aspek kesetaraan merujuk pada sejauh mana kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi dan eksklusi memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya di berbagai sektor serta dalam mendapatkan kekuasaan. Kesetaraan berfungsi sebagai dasar untuk memastikan akses yang terbuka bagi semua kelompok masyarakat, sehingga tidak ada monopoli sumber daya sekelompok individu atau kelompok tertentu. Aspek kesetaraan memastikan bahwa seluruh kelompok warga negara tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan adanya kesetaraan dapat meminimalisir terjadinya monopoli sumber daya oleh kelompok tertentu yang lebih dominan yang dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat tercapainya tujuan demokrasi yang adil dan inklusif. Terdapat beberapa indikator dalam aspek kesetaraan antara lain :

- a. Kesetaraan gender
- b. Keterlibatan masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui saluran lembaga perwakilan
- c. Pencegahan praktik monopoli oleh kelompok tertentu dalam penguasaan sumber daya ekonomi
- d. Pemberian akses perlindungan dan jaminan sosial bagi warga miskin
- e. Kesetaraan dalam peluang kerja di berbagai wilayah
- f. Akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik
- g. Kesetaraan dalam akses pelayanan dasar bagi seluruh warga

3. Aspek lembaga Demokrasi

Aspek lembaga demokrasi sebagai badan kelembagaan yang mendukung terbentuknya dan berjalannya sistem politik yang demokratis dalam suatu negara. Lembaga demokrasi menjadi institusi yang menjamin partisipasi warga, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan kekuasaan dan penegakan hukum. Institusi mencakup lembaga eksekutif, yudikatif serta infrastruktur demokrasi lainnya seperti pemilu, partai politik, media massa, dll. Institusi berfungsi memastikan keterwakilan politik secara adil, akuntabilitas publik, serta pengawasan dan pembatasan kekuasaan sehingga demokrasi dapat berjalan

sehat dan adil. Terdapat beberapa indikator dalam aspek lembaga demokrasi antara lain :

- a. Efektivitas kerja lembaga legislatif
- b. Kinerja lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum
- c. Netralitas penyelenggara pemilu
- d. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
- e. Komitmen pemerintah atau pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dan kehidupan masyarakat
- f. Keterbukaan anggaran dalam penyampaian informasi APBN dan APBD oleh pemerintah
- g. Efisiensi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik
- h. Pendidikan politik untuk mempersiapkan kader partai politik

2.1.7 Hubungan Antar Variabel

2.1.7.1 Investasi terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Investasi dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi wilayah dengan cara yang kompleks tergantung pada jenis dan alokasi investasi tersebut. Investasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah yang menerima aliran modal, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, jika alokasi investasi tidak merata maka dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Investasi yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu terutama di kota atau kawasan industri yang sudah berkembang, cenderung memperkuat ketimpangan. Daerah-daerah ini memiliki infrastruktur yang lebih baik, tenaga kerja terampil, dan fasilitas pendukung yang memadai sehingga lebih menarik bagi investor. Hal ini mendorong daerah tersebut semakin maju, sementara daerah lainnya yang tidak mendapatkan aliran investasi akan tertinggal dalam aspek ekonomi, sosial dan infrastruktur.

Selain itu, investasi yang lebih fokus pada sektor teknologi yang tinggi atau industri besar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi biasanya hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan.

Sementara itu, sektor-sektor yang lebih berbasis pada pembedayaan masyarakat lokal seperti investasi dalam Pendidikan, Kesehatan atau UMKM dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi di wilayah yang kurang berkembang. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dapat dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mengarahkan kebijakan investasi untuk merata dengan memberikan insentif bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah-wilayah yang tertinggal.

Dengan demikian, pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah bergantung pada bagaimana investasi tersebut di alokasikan dan seberapa efektif kebijakan pembangunan yang mendukung pemerataan distribusi investasi diseluruh wilayah.

2.1.7.2 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi antar wilayah bersifat kompleks dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak selalu berarti bahwa pertumbuhannya merata di seluruh wilayah. Wilayah yang lebih maju dalam hal infrastruktur, akses Pendidikan, dan fasilitas lainnya akan lebih cepat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi, contohnya di kota besar atau daerah industri akan lebih mudah menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas yang meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Namun, wilayah yang lebih tertinggal akan sering kali tidak memiliki kondisi mendukung untuk ikut serta dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan kurangnya akses terhadap pasar, fasilitas pendukung, tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi meningkat secara keseluruhan, keuntungan tersebut seringkali hanya terdistribusi di wilayah-wilayah yang sudah lebih maju sehingga memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, perlunya ada kebijakan pemerintah yang memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh wilayah bukan Sebagian kecil wilayah yang sudah lebih maju sehingga ketimpangan ekonomi wilayah dapat berkurang.

2.1.7.3 Infrastruktur Jalan terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Infrastruktur jalan berperan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Jalan yang berkualitas dan terhubung dengan baik akan meningkatkan aksesibilitas antar daerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Daerah yang memiliki jaringan jalan yang baik akan lebih mudah mengakses pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, yang berkontribusi pada pemerataan pembangunan. Selain itu, kualitas jalan yang memadai juga dapat meningkatkan daya tarik wilayah bagi investor yang akan menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru. Daerah yang terhubung dengan jaringan jalan yang baik memiliki akses yang lebih mudah ke pusat-pusat ekonomi, mempercepat pertumbuhan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan industri.

Sebaliknya, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan pembangunan di Indonesia. Daerah yang terisolasi atau jauh dari pusat ekonomi sering kali kekurangan akses jalan yang memadai yang menghambat mobilitas penduduk dan barang. Hal ini membuat daerah-daerah tersebut sulit berkembang karena terbatasnya akses ke pasar dan sumber daya lainnya. Ketimpangan antara pusat dan daerah semakin lebar, dengan daerah yang lebih maju seringkali memperoleh manfaat lebih besar dari konektivitas yang baik, sementara daerah tertinggal terperangkap dalam keterbatasan infrastruktur.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur jalan yang merata sangat penting untuk mengurangi ketimpangan ini. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan jalan di daerah-daerah tertinggal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pemerataan ekonomi. Dengan konektivitas yang lebih baik, diharapkan ketimpangan pembangunan antara wilayah dapat dikurangi, menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua daerah di Indonesia.

2.1.7.4 Demokrasi terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Demokrasi dan ketimpangan ekonomi wilayah saling berkaitan karena demokrasi mempengaruhi perumusan dan penerapan kebijakan ekonomi. Demokrasi dapat diukur dengan Indeks Demokrasi yang mencakup tiga aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek lembaga demokrasi. Di negara dengan sistem

demokrasi yang kuat, kebijakan pemerintah akan lebih terbuka dan memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat termasuk wilayah yang tertinggal

Negara dengan Indeks Demokrasi yang tinggi cenderung memiliki kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung pemerataan pembangunan. Artinya, pemerintah berusaha untuk tidak hanya memajukan wilayah yang sudah berkembang tetapi juga memberikan perhatian kepada daerah tertinggal. Contohnya, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, memberikan insentif untuk investasi di daerah tersebut dan meningkatkan akses masyarakat di wilayah tertinggal terhadap layanan Pendidikan, Kesehatan, dll. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata dan ketimpangan antara wilayah dapat berkurang.

Namun, negara yang memiliki Indeks Demokrasi rendah kebijakan pemerintah lebih sering menguntungkan kelompok-kelompok elit atau wilayah yang sudah maju. Pemerintah tidak terlalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau kurangnya transparan dalam pengambilan keputusan cenderung mengabaikan wilayah yang tertinggal. Akibatnya, ketimpangan ekonomi antara wilayah berkembang dan wilayah tertinggal semakin lebar karena tidak ada kebijakan yang memprioritaskan pemerataan pembangunan.

Meskipun demokrasi tidak otomatis menghilangkan ketimpangan ekonomi, tetapi sistem ekonomi yang baik memiliki potensi untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Dengan memastikan adanya partisipasi publik dalam proses politik, transparansi dalam pengambilan keputusan serta kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan seluruh masyarakat. demokrasi dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua wilayah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Analisis	Metode Analisis	Hasil
1.	Ari Ferdian, Zul Azhar, Novya Zulva Riani (2024)	Variabel Terikat : Ketimpangan pembangunan Variabel Bebas : 1.Laju pertumbuhan ekonomi 2.Indeks pembangunan manusia 3.Penanaman modal asing 4. Angkatan kerja	Pendekatan regresi data panel dengan FEM	Laju pertumbuhan ekonomi dan Penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan pembangunan. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan pembangunan.
2.	Riski Doni Damara, Madnasir, Nurhayati (2024)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pembangunan Variabel Bebas : 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Investasi 3. Jumlah penduduk	Pendekatan regresi data panel dengan REM	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

No.	Peneliti	Variabel Analisis	Metode Analisis	Hasil
				Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.
3.	Mahardhika Cipta Raharja, Unik Lestari (2022)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pembangunan Variabel Bebas : 1. Penanaman modal asing 2. Penanaman modal dalam negeri 3. Indeks pembangunan manusia	Pendekatan regresi data panel dengan FEM	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Penanaman Modal Asing berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan.
4.	Yuniar Sri Hartati (2019)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pembangunan Ekonomi	Pendekatan regresi data panel dengan FEM	Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan

No.	Peneliti	Variabel Analisis	Metode Analisis	Hasil
		Variabel Bebas : 1. Indeks pembangunan manusia 2. Infrastruktur jalan 3. Penanaman modal asing		terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. infrastruktur jalan dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah.
5.	Anin Nabail Azim, Hady Sutjipto, Rah Adi Fahmi Ginanjar (2022)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pembangunan Variabel Bebas : 1. Indeks pembangunan manusia 2. Infrastruktur jalan 3. Penanaman modal dalam negeri 4. Penanaman modal asing	Pendekatan regresi data panel dengan FEM	Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Infrastruktur jalan dan Penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

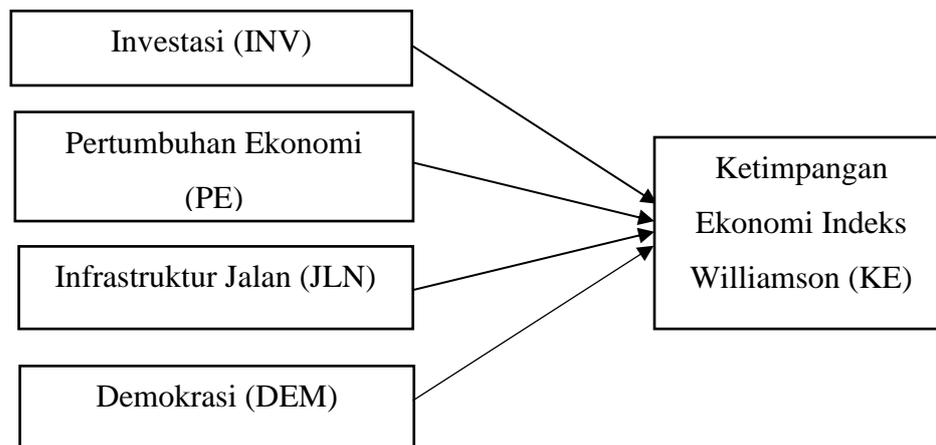
No.	Peneliti	Variabel Analisis	Metode Analisis	Hasil
6.	Kurniati Mansyur, Nursini, Hamrullah (2021)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pembangunan Variabel Bebas : 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Investasi 3. Pengeluaran pemerintah	Analisis regresi linier berganda	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan kterhadap Ketimpangan Pembangunan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.
7.	Hendri Wibowo, Lutfi Aris Sasongko (2021)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pembangunan Variabel Bebas : 1. Penanaman modal dalam negeri 2. Penanaman modal asing	Pendekatan regresi data panel dengan FEM	Penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.
8.	Muhammad Ridho, Zulgani, Erni Achmad (2022)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pembangunan Variabel Bebas : 1. Pengeluaran pemerintah	Pendekatan regresi data panel dengan FEM	Pengeluaran pemerintah, Pengangguran, Investasi, Tenaga kerja berpengaruh negative dan

No.	Peneliti	Variabel Analisis	Metode Analisis	Hasil
		2.Pengangguran 3.Investasi 4.Tenaga kerja 5.Produk domestik regional bruto		signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.
9.	Yuni Yuli Anti, Ali Anis (2024)	Variabel Terikat : Ketimpangan Pendapatan Variabel Bebas : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Indeks demokrasi indonesia 4. Pertumbuhan ekonomi	Pendekatan data panel statistik dengan analisis FEM	Variabel Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Indeks Demokrasi menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.
10.	Nur Asmaiyah, Ris Yuwono Yudo	Variabel Terikat : Ketimpangan pendapatan	Pendekatan analisis data panel dengan FEM	Kredit Bank Umum , Kredit UMKM berpengaruh positif dan

No.	Peneliti	Variabel Analisis	Metode Analisis	Hasil
Nugroho (2022)	Variabel Bebas : 1. Kredit Bank Umum, Kredit UMKM 2. Produk Domestik Regional Bruto 3. Tingkat Pengangguran Terbuka 4. Angkatan Kerja 5. Indeks Demokrasi Indonesia		signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Indeks Demokrasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.	

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori, fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dapat diuji secara empiris dan berfungsi sebagai prediksi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis diajukan sebelum melakukan penelitian dan dianggap sebagai dasar dari analisis yang akan dilakukan. Hipotesis dibedakan menjadi dua jenis yaitu hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variabel dan hipotesis alternative (H_a) menyatakan bahwa ada hubungan dan perbedaan yang signifikan.

1. H_1 : Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.
2. H_2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.
3. H_3 : Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.

4. H_4 : Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.
5. H_5 : Investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif guna menganalisis pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Analisis dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan ekonometrika untuk mendeskripsikan fakta dan menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS. Analisis dilakukan dengan pendekatan data panel, yang dipilih karena kemampuannya menyediakan observasi yang lebih banyak, sehingga memperluas derajat kebebasan dan membantu mengatasi potensi penghilangan variabel. Ruang lingkup penelitian ini yaitu 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023. Teknik analisis menggunakan *Eviews* 12.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis pengaruh empat variabel independen yakni investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan demokrasi terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan ekonomi wilayah.

Table 3.1 Deskripsi Variabel

Variabel	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Ketimpangan Ekonomi wilayah	Indeks	Badan Pusat Statistik
Investasi	Triliun Rupiah	Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	Badan Pusat Statistik
Infrastruktur Jalan	Kilometer	Badan Pusat Statistik
Demokrasi	Indeks	Badan Pusat Statistik

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018-2023)

1. Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan ekonomi wilayah merupakan variabel dependen dengan simbol (KE). Ketimpangan ekonomi wilayah adalah kondisi dimana ada perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar daerah dalam suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi wilayah diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson berkisar antara 0 hingga 1. Nilai mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pembangunan wilayah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai daerah. Sebaliknya, nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak merata antar daerah. Rumus Indeks Williamson antara lain (Anwar et al., 2023)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}}{\bar{Y}}$$

Keterangan :

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB per kapita daerah kab / kota di tiap provinsi di Indonesia

\bar{Y} : PDRB per kapita rata-rata daerah kab / kota di tiap wilayah di Indonesia

f_i : Jumlah penduduk daerah kab / kota di tiap provinsi di Indonesia

n : Jumlah penduduk di tiap provinsi di Indonesia

Kreteria hasil yang digunakan antara lain Syafrizal (1997) dalam (Waluyaningsih & Setiawan, 2020)

Indeks 0.7-1 : Tinggi

Indeks 0.4-0.69 : Sedang

Indeks < 0.39 : Rendah

2. Investasi

Investasi merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan (INV) dan diukur dalam satuan triliun rupiah. Data yang digunakan yaitu PMDN dan PMA. Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada berbagai aset dalam jangka Panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pemerintah umumnya berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara sektor swasta lebih fokus pada efisiensi, inovasi, dan teknologi.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan (PE) dan diukur dalam satuan persentase. Data yang digunakan yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada bertambahnya kapasitas suatu negara/wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan (JLN) dan diukur dalam satuan kilometer (km). Data yang digunakan yaitu total panjang jalan yang mencakup jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kab/Kota. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 jalan diklasifikasikan infrastruktur transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas, jalan yang berada dipermukaan tanah, diatas tanah, dibawah tanah, di atas air atau di bawah permukaan air kecuali jalur kereta api, lori maupun kabel.

5. Demokrasi

Demokrasi merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan (DEM). Data yang digunakan yaitu Indeks Demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan negara. Hal ini berarti rakyat memiliki hak dan kebebasan penuh untuk terlibat aktif dalam seluruh proses politik dan pengambilan keputusan. Demokrasi diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia yang menilai kualitas tata kelola dan transparansi kebijakan dalam mendukung pembangunan inklusif, dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek lembaga demokrasi. Berdasarkan nilai Indeks, tingkat demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu rendah (indek < 60), sedang (indek 60-80), dan tinggi (indek > 80). Semakin tinggi nilai Indeks semakin kuat sistem demokrasi dalam memastikan kebebasan sipil, hak-hak politik dan efektivitas lembaga negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi (Hidayatul et al., 2021).

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KE_{it} = \beta_0 + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 JLN_{it} + \beta_4 DEM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

KE : Ketimpangan ekonomi

INV : Investasi

PE : Pertumbuhan ekonomi

JLN : Infrastruktur jalan

DEM: Demokrasi

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien regresi

i : 1,2,...,n, yaitu data silang

t : 1,2,...,n, yaitu data runtut waktu

ε : *Error term*

Beberapa metode pengujian yang digunakan menurut sebagai berikut (Gujarati, 2009)

1. Metode Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga metode CEM, metode FEM dan metode REM. Ketiga metode tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Berikut penjelasan masing-masing metode :

a. *Common Effect Model* (CEM)

Estimasi metode ini merupakan bentuk estimasi yang paling dasar dalam pengujian data panel. Estimasi ini hanya menggunakan data *cross-section* dan data *time series*. Berikut persamaan untuk model CEM :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

$X_{1,2,nit}$: Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

β_0 : Konstanta (*intercept*)

$\beta_{1,2,n}$: Koefisien regresi

ε_{it} : *Error term*

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model regresi FEM mengasumsikan adanya perbedaan intersep antar unit pengamatan. Cara mengestimasi model ini adalah dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini juga disebut dengan *Least Square Dummy Variabels*. Metode FEM, estimasi dapat dilakukan baik tanpa pembobot (no weight) menggunakan *least square dummy variabel (LSDV)* maupun dengan pembobot (cross-section weight) menggunakan *general least square (GLS)*. Pembobotan bertujuan untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross-section (Chrisetyoningrum, 2022; Muliyawati & Sasana, 2022; Nurhaeni, 2022; Ridho et al., 2022). Pada model FEM parameter yang dapat diterapkan meliputi pembobotan dengan field parameter dengan menggunakan cross-section weight serta metode kovarians koefisien dengan field parameter yang menggunakan white cross section. Tujuan penggunaan parameter adalah untuk memperbaiki kualitas estimasi yang dihasilkan (Ariefianto, 2012). Berikut persamaan untuk model FEM :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \dots + \beta_n D_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

$X_{1,2,nit}$: Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

$D_{1,2,3,n}$: 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas individu yang tidak berpengaruh

β_0 : Konstanta (*intercept*)

$\beta_{1,2,n}$: Koefisien regresi

ε_{it} : *Error term*

c. *Random Effect Model (REM)*

Model REM adalah model estimasi data panel yang mengasumsikan bahwa variabel gangguan dapat berkorelasi antar waktu dan antar individu. Berikut persamaan untuk model REM :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

$X_{1,2,nit}$: Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

β_0 : Konstanta (*intercept*)

$\beta_{1,2,n}$: Koefisien regresi

ε_{it} : *Error term*

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Terdapat beberapa pengujian untuk memilih teknik estimasi data panel yaitu:

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat antara CEM dan FEM. Hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \text{CEM}$$

$$H_a : \text{FEM}$$

Uji Chow menggunakan uji hipotesis dengan membandingkan nilai F statistik dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka menolak H_0 artinya FEM lebih baik digunakan. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka H_0 diterima artinya CEM lebih baik digunakan. Selain itu dapat juga dilihat pada probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka CEM lebih baik. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka FEM lebih baik.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih baik antara FEM dan REM dalam estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \text{REM}$$

$$H_a : \text{FEM}$$

Uji Hausman menggunakan uji hipotesis dengan membandingkan nilai F statistik dengan nilai F tabel. Jika nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel, maka menolak H_0 dan model yang baik adalah REM. Sebaliknya, jika nilai F

statistik lebih kecil dari nilai F tabel, maka menolak H_0 dan model yang baik adalah FEM. Selain itu dapat juga dilihat pada probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka REM lebih baik. Sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka FEM lebih baik.

c. Uji Breusch-Pagan LM

Uji Breusch-Pagan LM digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat antara CEM dan REM. Hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \text{CEM}$$

$$H_a : \text{REM}$$

Apabila nilai probabilitas Breusch-pagan lebih besar dari 5 % maka CEM lebih baik. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Breusch-pagan lebih kecil dari 5 % maka REM lebih baik.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk memeriksa apakah data yang digunakan dalam analisis data memenuhi asumsi - asumsi klasik atau tidak. Dalam data panel, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak perlu dilakukan karena pengujian ini hanya dilakukan pada data *time series*, jika dilakukan pengujian pada data selain *time series* seperti data cross section atau data panel maka hasilnya akan sia-sia atau tidak berarti (Basuki, 2021; Basuki & Prawoto, 2015). Terdapat beberapa uji asumsi klasik, antara lain :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi normal. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal yaitu metode JB dan metode grafik. Uji JB digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas, dimana jika probabilitas > 0.05 yang berarti data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam suatu model regresi saling berkorelasi. Model regresi dikatakan baik jika variabel bebasnya tidak saling berkorelasi. Model regresi dikatakan

mengalami multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebasnya lebih dari 0,8. Sebaliknya, model regresi bebas dari multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebasnya kurang dari 0,8.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji apakah errornya regresi memiliki varian yang konstan dan tidak saling berhubungan antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan estimasi *error term* menjadi bias dan tidak relevan. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, kita dapat menggunakan uji t. Jika t-statistik lebih besar dari t-tabel dan signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, maka terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika t-statistik lebih kecil dari t-tabel dan tidak signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, maka tidak ada heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah kesimpulan penelitian yang diambil valid dan data yang digunakan akurat. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Uji t-statistik (Parsial)

Uji t statistik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah

$H_0: \beta_1 = 0$: Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

$H_a: \beta_1 \neq 0$: Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah

$H_0: \beta_2 = 0$: Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

$H_a: \beta_2 \neq 0$: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

3. Pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah

$H_0: \beta_3 = 0$: Infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

$H_a: \beta_3 \neq 0$: Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

4. Pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah

$H_0: \beta_4 = 0$: Demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

$H_a: \beta_4 \neq 0$: Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

Pengambilan keputusan dengan kriteria yaitu

1. Ketika nilai t-statistik > nilai t-tabel atau $p\text{-value} < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat
2. Ketika nilai t-statistik < nilai t-tabel atau $p\text{-value} > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F statistik)

Uji signifikansi simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis secara bersamaan (simultan) dilakukan dengan menggunakan uji statistik F untuk menentukan apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99%, 95%, atau 90%. Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil uji tersebut benar. Derajat kebebasan (df) adalah jumlah data yang bebas. Derajat kebebasan untuk uji F adalah $(n-k)$, dengan n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas. Uji F yang digunakan antara lain

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 = 0$ Variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_1; \beta_2; \beta_3 \neq 0$ Variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Pengambilan keputusan dengan kriteria yaitu

1. F-hitung $>$ F-tabel atau $p\text{-value} < \alpha = 0.05$ maka menolak H_0 artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. F-hitung $<$ F-tabel atau $p\text{-value} < \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran seberapa baik variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai R^2 semakin baik variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai R^2 yang sempurna adalah 1, yaitu apabila variabel terikat dapat sepenuhnya dijelaskan oleh variabel bebas

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia pada periode 2018 sampai 2023. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Investasi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah. Hal ini memperlihatkan perbedaan dalam tingkat investasi antar wilayah cenderung memperbesar ketimpangan ekonomi antar wilayah.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah, Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya berpendapatan lebih tinggi dibanding yang pertumbuhannya rendah sehingga memperbesar ketimpangan ekonomi antar wilayah.
3. Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah, dengan adanya infrastruktur jalan maka produktivitas dan aksesibilitas barang antar wilayah akan meningkat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.
4. Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Institusi ekonomi yang ekstraktif menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang disebabkan akses ekonomi dan politik lebih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir pihak dan memperburuk ketimpangan ekonomi wilayah.
5. Investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia antara lain :

1. Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan arus investasi di wilayah yang memiliki ketimpangan ekonomi tinggi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa distribusi investasi tidak terpusat di wilayah tertentu saja melainkan merata di seluruh wilayah sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah.
2. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengoptimalkan peran desentralisasi fiskal agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola keuangan daerah melalui pengembangan sektor ekonomi dan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah. Mengingat adanya hubungan saling memengaruhi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan, kebijakan yang diterapkan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pemerataan pembangunan.
3. Pemerintah pusat berkerja sama dengan pemerintah pusat perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yang merata di seluruh wilayah dengan memprioritaskan daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Pembangunan jalan yang baik akan mampu meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas barang antar wilayah sehingga ketimpangan dapat berkurang.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem demokrasi dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, memperbaiki kualitas layanan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi wilayah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah.
5. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang akan menganalisis lebih dalam mengenai hubungan antara investasi, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Selain itu, Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2023). *Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Studi : 10 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2022)*.
- Adnyana, I. M. (2020). Manajemen Investasi dan Portofolio. In *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Kinerja*, 20(1), 53–68. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>
- Al-Khansa, B. B., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi Yang Berkeadaban Dari Saat Ini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 249–258. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1429>
- Alfurqani, Z. H., Widiarsih, D., & Algusri, J. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 295–307.
- Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 54–60. <https://doi.org/10.37034/infab.v5i1.206>
- Anti, Y. Y., & Anis, A. (2024). Pengaruh Aspek Sosial-Politik dan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 58–67.
- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika : Esensi dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*.
- Asmayah, N., & Nugroho, R. Y. Y. (2022). Peran Pengembangan Sektor Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2011-2019. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 8(3), 366–375. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i3.9594>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu*

- Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Bappedda. (2017). *Pembangunan Ekonomi*.
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-13>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Boianovsky, M. (2019). *Divergence and Convergence: Paul Samuelson On Economic Development*.
- Chrisetyoningrum, A. (2022). Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Jumlah Pendidikan Terhadap Tingkat Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020. *Economic Diponogoro*, 11, 1–57.
- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>
- Damara, R. D., Madnasir, & Nurhayati. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan pada 34 Provinsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Tahun Periode 2019-2023). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(3), 310–323.
- Dewanto, F. W., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 4(1), 46–60.
- Dewi, A. P., Hasri, D. A., & Sanjani, M. R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 06(01), 28–38. <https://www.neliti.com/publications/563417/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-ketimpangan-wilayah-di-provinsi-nusa-tenggara-ba>
- Fahma, B. A., & Hendaro, R. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2020. *Diponegoro Journal Of Economics*, 11(2), 67–81.
- Ferdian, A., Azhar, Z., & Riani, N. Z. (2024). Determinan Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan (MedRep)*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Firdaus, M. (2013). *Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Indonesia: Fakta Dan Strategi Inisiatif Orasi Ilmiah*.
- Gabriel, C. T., Walewangko, E. N., & Mandei, D. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Industri Pengolahan Sektor Perikanan

- terhadap Ketimpangan Pembangunan Kota Bitung Tahun 2002 – 2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 127–137.
- Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics. In *Douglas Reiner*.
- Hadju, I. intan, Masinambow, V. A. ., & Maramis, M. T. . (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 110–120.
- Hanim, A., Hermawan, G. B., & Wilantari, R. N. (2022). Pengaruh Investasi dan Perkembangan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Penelitian Sains Dan Teknologi Indonesia*, 1(2), 131–140.
- Hartati, Y. S. (2019). Analisis Disparitas Wilayah Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 1–22.
- Hasan, S., Piliang, M. Z., & Siregar, S. M. S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 130–139. <https://ejournalstebis.ac.id/indek.php/At-Tanmiyah/indek>
- Haslinda, & Arapi, R. (2024). Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Kritis*, 8(2), 111–133.
- Hidayatul, F., Wahyuni, N., Saputra, B., & Maani, K. D. (2021). Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 108–128.
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. *Totaloka*, 21(1), 75–84.
- Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.6903>
- Jhingan, M. . (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137–145. <http://journal.maranatha.edu>
- Karim, T. Z., Harahap, H. H., & Mardalena, M. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Dalam Upaya Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jambi. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(2). <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe>
- Koyongian, C. L., Kindangen, P., & Kawung, G. M. . (2019). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 16(4), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23425.16.4.2014>

- Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(1), 13–23.
- Mahakso, W., & Handoko, B. S. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi 2003-2010*.
- Malik, G. A., Maso, M. S. P. P., Akbar, M. Z., & Fathona, S. (2021). Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan dan Tradisi Suku Bugis. 5(2), 701–707.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*.
- Manshur, M. F. S. A., & Damayanti, A. S. (2023). *Profil Indeks Demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023*. <https://doi.org/4601007.52>
- Mansyur, K., Nursini, & Hamrullah. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Managemnt Review (DPMR)*, 1(2), 79–107.
- Marpaung, T. A., Daei, M. I., Habibi, D., & Harahap, N. (2024). Strategi Pembangunan Nasional Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 317–334. <https://doi.org/10.59059/jupiek.v2i1.986>
- Muliyawati, A., & Sasana, H. (2022). Analisis Determinan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 1(1), 104–124.
- Mustika, C., Haryadi, Junaidi, & Zamzami. (2023). Income Inequality in a Democratic and Social Perspective in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 16(2), 230–241.
- Muttaqin, Z. (2017). *Review Buku Mengapa Negara Gagal-Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan Karya Daron Acemoglu dan James A.Robinson*.
- Nurfifah, R., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, 22(5), 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42318>
- Nurhaeni. (2022). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Of Economics*, 11(1), 26.
- Nurhayani, R. (2014). Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 3(1), 456–463. <https://doi.org/10.22437/jmk.v3i1.1861>
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. CV Budi Utama.

- Putri, R. Y., Andiny, P., Safuridar, & Martahadi. (2024). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 168–183.
- Raharja, M. C., & Lestari, U. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 86–101.
- Rahman, A. N., & Imansyah, M. H. (2021). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 331–343.
- Rahman, M. (2020). *Hukum Investasi*.
- Rahmanto, A. (2016). Evaluasi Kerusakan Jalan Dan Penanganan Dengan Metode Bina Marga Pada Ruas Jalan Banjarejo - Ngawen. *Simetris*, 10(1), 17–24.
- Ramadhan, Z. (2023). Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan : Analisis Data Panel 9 Negara Asean Tahun 1973-2020. *Dipenogoro Journal Of Economics*, 12(1), 45–53.
- Ridho, M., Zulgani, & Achmad, E. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 47–58.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>
- Royan, M., Riyanto, W. H., & Nuraini, I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(3), 365–375. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i3.8993>
- RPJM. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/114/1/012081>
- RPJMN. (2019). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. In *Kementerian perencanaan pembangunan nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Sabardin, & Wibowo, M. G. (2023). Pengaruh Aspek-Aspek Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2), 119–131.
- Sadono, S. (2004). *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (P. R. G. Persada & Jakarta (eds.); 1st ed.).
- Salsabila, R. H. (2022). Analisis Pengaruh Aktivitas Pertambangan, Panjang Jalan, TPAK, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Kalimantan Tahun 2014-2019.
- Saputra, D. S. (2024). *Ketimpangan Pendapatan Di Kawasan Indonesia Timur*

Dengan Pembuktian Hipotesis Kuznets (Issue April).

- Silaban, K., Fayza, S., & Matondang, K. (2024). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Perdagangan Internasional (Ekspor dan Impor) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 147–152. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1596>
- Sinaga, B. K., Buulolo, M., Utami, D., Ichwani, A. T., & Pane, S. G. (2024). Pengaruh Model-Solow Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal Of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 709–716. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7362>
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution To The Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal Of Economics*, 70(1), 65–94.
- Sudarmadji. (2022). *Buku Ajar Analisis Investasi* (L. M. Samryn (ed.)). Tanri Abeng University Press.
- Sukwika, T. (2018a). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Sukwika, T. (2018b). Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Syaifudin, R., Salman Alfarisi, M., Stephanie Regina Putri, G., Abdul Jabbar, M., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). Determinan Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2012-2022: Pendekatan Analisis Panel Dinamis. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(2), 129–137.
- Tamba, A. V., Purba, M. L., & Sihotang, J. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Periode 2000–2020. *Jurnal Kajian Fenomena Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–10.
- Tayeb, I., Anwar, C., & Suparman. (2022). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2000-2020. *Jurnal Katalogis*, 10(1), 24–34. <http://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/katalogis/index>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development*.
- Wagle, U. R. (2009). Inclusive democracy and economic inequality in South Asia: Any discernible link? *Review of Social Economy*, 67(3), 329–357. <https://doi.org/10.1080/00346760902908617>
- Waluyaningsih, V. D., & Setiawan, A. H. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antarwilayah di Kawasan Kedungsepur, Barlingmascakeb dan Subosukawonosraten Periode 2008-2017. *Diponegoro Journal Of Economics*, 9(2006), 123–134.
- Wibowo, H., & Sasongko, L. A. (2021). Ketimpangan Pembangunan Regional Dan

- Investasi Di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, 1(2), 118–123. <https://doi.org/10.31942/ce.v6i2.5530>
- Widyandini, R. (2023). *Pemerataan Wilayah untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/rizqiyawidyandini3010/655d8dd9ee794a445f7e6ce2/pemerataan-wilayah-untuk-mencapai-pertumbuhan-ekonomi-yang-lebih-inklusif-dan-berkelanjutan>
- Wike, R., Fagan, M., Huang, C., Clancy, L., & Lippert, J. (2025). *Economic Inequality Seen as Major Challenge Around the World*. 1–76.
- Yesiana, R., Handayani, W., & Hayati, R. N. (2015). Keterkaitan Migrasi Penduduk dan Perekonomian Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 13(1), 93–108.
- Yusica, L. V., Nazaruddin, M., & Arifin, Z. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antarwilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurna Ilmu Ekonomi*, 2(2), 230–240.
- Zaharah, R., Nur, E. R., & Santoso, R. (2022). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14(02), 70–80.
- Zulkarnaen, I. (2017). Socio-Political and Economic Determinants of Income Inequality in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 3(1), 224–239. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.21>
- Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati. (2018). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan TPT Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 2010-2018. *Directory Journal Of Economic*, 2(1), 602–615.